

Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Evaluation Of The Implementation Of The Government Financial Accounting System At The South Buko District Office, Banggai Island Regerency

Ignasia Tesalonika Nukak¹, Inggriani Elim², Lady Diana Latjandu³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail:

[1nukaktesalonika@gmail.com](mailto:nukaktesalonika@gmail.com) , [2inggriani_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id) , [3ladydianalatjandu@gmail.com](mailto:ladydianalatjandu@gmail.com)

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan staff dari kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, telah berjalan dengan baik dan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata kunci: Penerapan Sistem ; akuntansi ; keuangan pemerintah

Abstract: The purpose of this study is determine and evaluate the application of the government's financial accounting system at the South Buko District office, Banggai Islands Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative research method, data collection using interview, observation, and document study techniques with staff from the South Buko District office, Banggai Islands Regency. The results showed that the recording and reporting at the South Buko District office, Banggai Islands Regency using the Regional Management Information System (SIMDA) application for Finance, had been going well and the implementation of the government's financial accounting system was in accordance with PERMENDAGRI No. 13 of 2006 concerning regional financial management guidelines and PP no. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Keyword : System Implementation; accounting ; government finance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik, dalam perkembangannya khususnya di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing pemerintah daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik untuk mengelola keuangan secara transparan, adil, efisien, efektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi

keuangan pemerintah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pada hakekatnya didalam pemerintahan belum dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada SAP. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kecamatan Buko Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam survey awal, pencatatan dan pelaporan pada kantor Kecamatan Buko Selatan menerapkan sistem aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangannya. Dengan digunakannya aplikasi SIMDA keuangan ini, kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Disisi lain juga, aplikasi ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pada kantor Kecamatan Buko Selatan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan agar dapat melaksanakan dan menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara integritas, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Hal ini dilakukan karena mengikuti kebijakan dari Pemerintah Daerah serta untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan serta pelaporannya, sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan lebih akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan sekaligus pelaporan transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya yang bertujuan untuk pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dan akuntabilitas (Bahri, 2019:5). Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Jamaluddin, 2019:2).

1.2 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelola perusahaan. Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak eksternal dan internal yang membutuhkan (Mulyadi, 2016:3). Tambahan lain diberikan Romney dan Steinbart (2019:11), yang mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi dapat menjadi sistem manual pensil dan kertas, sistem kompleks yang menggunakan Teknologi Informasi terbaru, atau sesuatu diantara keduanya. Terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya adalah sama. Sistem Informasi Akuntansi harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi.

1.3 Unsur Laporan Keuangan

Ada 7 komponen laporan keuangan pemerintah menurut Jamaluddin (2019:130), yaitu ; 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional,

5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 ayat (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap / barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

1.5. Penelitian Terdahulu

1. Iktina Nuris (2020) tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada kantor camat Montasik Aceh Besar Tahun 2016-2018, mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Montasik Aceh Besar belum melakukan pemisahan jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan pada Kantor Camat Montasik Aceh Besar telah melakukan penyusutan asset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Yeni Priatna Sari, Hertika tika, Nurul Mahmudah (2017) tentang Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrua: Studi Kasus di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardiah Kota Tegal, mendapatkan hasil bahwa RSUD Kardiah telah siap dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Dilihat dari beberapa parameter seperti tingkat penerapan PP 71 Tahun 2010, kesiapan SDM, komitmen organisasi, komunikasi, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, kesiapan sarana prasarana.

3. Sri Widati, Irdawati Irdawati (2019) tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapatkan hasil bahwa BPKAD Kab. Konawe telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Bapak camat Buko Selatan, Bendahara umum Kecamatan Buko Selatan, dan Staf pengelola SIMDA Keuangan Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti gambaran umum kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing staf. Serta laporan-laporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang diperoleh dari bendahara umum kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai

sesuatu secara mendalam. Wawancara juga bisa dipakai untuk membuktikan informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam pengumpulan data di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Camat, bendahara umum, dan staf pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar, selama observasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa Laporan Keuangan, Gambaran Umum Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dan dokumen-dokumen lainnya.

2.3. Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data, selanjutnya mengklasifikasikan dan mengelompokkan data, mengolah data, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan berdasarkan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu Kecamatan yang menerapkan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Hal ini dapat tercermin dari hasil wawancara dengan bendahara umum kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Lukman Yokimano, wawancara dilakukan secara langsung bertempat di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 29 Maret 2021), mengatakan :

“ Sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan program aplikasi SIMDA Keuangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah. “

Penerapan program aplikasi SIMDA Keuangan ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan diterapkannya aplikasi ini, kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melaksanakan pengelolaan keuangannya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Hal ini, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staff bendahara umum di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Lukman Yokimano, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 29 Maret 2021), mengatakan :

“ Tujuan diterapkannya SIMDA Keuangan ini yaitu dapat membantu serta mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan juga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat.”

Tambahan lain mengenai tujuan penerapan SIMDA Keuangan oleh Staff pengelola SIMDA Keuangan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Najib Kuakon,S.IP, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 29 Maret 2021), mengatakan :

“Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini yaitu agar menghasilkan informasi yang tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah.”

Program aplikasi SIMDA Keuangan ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Seperti yang disampaikan oleh staff pengelola SIMDA Keuangan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Najib Kuakon, S.IP, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 30 Maret 2021), mengatakan :

“ Adapun output yang dihasilkan dari penggunaan SIMDA Keuangan diantaranya Laporan Keuangan Pemerintah, penganggaran, dan penatausahaan.”

Program Aplikasi SIMDA Keuangan di desain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Marselinus Nukak, S.Sos, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, 30 Maret 2021), menjelaskan bahwa :

“ Pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses pengelolaan keuangannya menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan yang dimana mengikuti dasar hukum perundang-undangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum yang digunakan, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2. Mekanisme Pencatatan Transaksi Keuangan pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mekanisme pencatatan transaksi keuangan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara umum kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Lukman Yokimano, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 29 Maret 2021), mengatakan :

“ Sistem pencatatan transaksi keuangannya langsung diinput pada aplikasi SIMDA Keuangan. ”

Pencatatan transaksi keuangan secara komputerisasi dengan menggunakan program aplikasi lebih memudahkan dan juga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil wawancara dengan staf bagian pengelola SIMDA Keuangan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Najib Kuakon, S.IP, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 30 Maret 2021), mengatakan :

“Pencatatan transaksi menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan lebih mudah digunakan dan juga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

3.3. Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara umum di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bapak Lukman Yokimano, wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 31 Maret 2021), mengatakan bahwa :

“Laporan keuangan Pemerintah yang digunakan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Buku Kas Umum, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah berjalan dan terlaksana dengan baik yaitu sebagaimana mengikuti serta menerapkan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang ada di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah terlaksana dengan baik. Sistem pencatatan dan pelaporannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun *Output* yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Penganggaran, Penatausahaan (Lampiran 7 sampai dengan lampiran 11), dan Akuntansi dan Pelaporannya (Lampiran 1 sampai dengan lampiran 6).

Tujuan dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat serta dapat mempermudah dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah di kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai “ Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan”, dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan secara komputerisasi menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, hal ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Penerapan sistem pencatatan dan pelaporannya berjalan dan terlaksana dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

1. Bagi kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk lebih meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang handal untuk membantu dalam pengelolaan keuangan pemerintah agar dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., 2019. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK dan IFRS. Yogyakarta : Andi
- Erlina, dkk., 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Edisi pertama Salemba Empat, Jakarta.
- Khasanah, H.D., Pramudyastuti, O.L., 2020. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang*, *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan bisnis* 5 (2), 145-153. Retrivied from : <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/indeks.php/KURS/article/view/825>
- Marina, A., Wahjono, S.I., Sya'ban, M., dan Suarni, A., 2017. Sistem Informasi Akuntansi. UMSurabaya Publishing, Surabaya.
- Muthoharoh, S., dan Nugraheni, A.P., 2020. *Evaluasi Penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang*, *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal 1* (2), 81-89, 2020. doi : <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.221>
- Majid, J., 2019. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Pusaka Almaida. Gowa-Sulawesi Selatan.
- Mardiana, L., dan Pirmaningsih, L., 2018. *Evaluasi Penerapan Sistem Akrua Pada Aset Tetap di PEMDA Kabupaten Gresik*, *UNEJ e-Proceeding*, 2018. Retrivied from : https://scholar.google.com/scholar?hl=id%as_sdt=2007&as_ylo=2017&q=evaluasi+penerapan+sistem+akuntansi+pemerintahan&btnG=d=gs_qabs&u%23p%3Da6F-ybMddNwJ .
- Mulyadi., 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Novianti, A.S., 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya*, *Universitas Airlangga*, 2017. Retrivied from : <http://repository.unair.ac.id/63130/>
- Nuris, I., 2020. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada kantor camat Montasik Aceh Besar Tahun 2016-2018*. Retrivied from : <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/676>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Runtuwene, S.K., Gamaliel, H., 2019. *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi*, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7 (4), 2019. Retrivied from : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25242>

Romney, M.B., Steinbart, P.J., 2019. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga Belas : Salemba Empat.

Sugiyono., 2018. Jenis penelitian Kualitatif. Retrived from :

<https://eprints.umg.ac.id/3035/4/BAB%20III.pdf>

Sari, Y.P., Tika, H., dan Mahmudah, N., 2017. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrual: Studi Kasus di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal*, *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) 2 (1)*, 18-28, 2017. doi : <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i1.9>.

Tang, S.A., 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Triangle 1 (3)*, 1-15. Retrived from : <https://trianglesains.makarioz.org/index.php/JTS/article/view/55>

Undang-undang, 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang, 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang, 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widati, S., Irdawati, I., 2019. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara*, *Jurnal GeoEkonomi 10 (2)*, 253-259. doi : <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.97>

Yanto, E., dan Afkir, M., 2020. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli)*, *Indonesia Journal Of Strategic Manajement 3 (1)*. doi : <https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2819>